

MANUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM



2026



DEPUTI BIDANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN
MANAJEMEN ASN

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dan transparansi Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara Telah menyusun Manual Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2026 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Manual IKU disusun sebagai pedoman dalam melakukan pengukuran kinerja, pengumpulan data, serta pelaporan.

Manual IKP berisikan penjabaran Setiap IKP yang memberikan informasi karakteristik IKP berupa: Deskripsi, Formula penghitungan, tingkat validitas, unit penanggung jawab, sumber data, status data, jenis data, metode, polarisasi dan jadwal pelaporan. Diharapkan dengan adanya manual IKP ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa Memberikan petunjuk dan bimbingan- Nya kepada kita untuk mewujudkan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah kita rencanakan. Aamin.

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan
Manajemen Aparatur Sipil Negara,

\$

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKP 1. Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja III	4
IKP 2. Persentase penyelesaian penyelenggaraan layanan Manajemen ASN sesuai standar	6
IKP 3. Persentase Pemenuhan Pedoman Standar Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	8
IKP 4. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan Manajemen ASN	10
IKP 5. Persentase Capaian Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	13
IKP 6. Persentase Pemenuhan Service Level Agreement (SLA) Persuratan di Lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	15
IKP 7. Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	17
IKP 8. Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	19
IKP 9. Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	21
IKP 10. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	23
IKP 11. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	25

Manual Indikator Kinerja Program

Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN
Tahun 2026

IKP 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja III

Sasaran Program	Meningkatnya kepatuhan atas kebijakan manajemen ASN dan prinsip meritokrasi
Deskripsi Sasaran Program	Meningkatnya kepatuhan atas kebijakan manajemen ASN dan prinsip meritokrasi bermakna bahwa setiap kebijakan manajemen ASN dipatuhi oleh K/L/D. Peningkatan kepatuhan ditandai dengan semakin turunnya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip meritokrasi.
Indikator Kinerja Program	Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN di Wilayah Kelompok Kerja III
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari instansi pembina Manajemen ASN dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi. Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN Total instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sesuai dengan pembagian beban kerja di kelompok kerja yang telah ditetapkan.
	Formula
	$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah yang dibina A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah yang Menjadi Sasaran Pembinaan

Tujuan	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	(✓) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(✓) Outcome	() Outcome Antara		() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(✓) Cascading Peta	() Cascading Non Peta		() Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(✓) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Seluruh unit kerja/Kelompok Kerja			
Sumber Data	• Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN • Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN • Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	(✓) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(✓) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(✓) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(✓) Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi 2. Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring, modul mandiri 3. Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. 4. Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. 5. Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan			

IKP 2. Persentase penyelesaian penyelenggaraan layanan Manajemen ASN sesuai standar

Sasaran Program	Terwujudnya Pelayanan dan Pembinaan Manajemen ASN yang Unggul
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa diharapkan BKN dapat memberikan penyelenggaraan manajemen ASN dan pembinaan manajemen ASN dengan pelayanan yang unggul, antara lain: - Penyelenggaraan Layanan seluruh aspek manajemen ASN meliputi penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan manajemen ASN; - Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN strategis meliputi penyusunan kebijakan teknis manajemen ASN dan bimbingan teknis.
Indikator Kinerja Program	Persentase penyelesaian penyelenggaraan layanan Manajemen ASN sesuai standar
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Indikator ini bermakna bahwa penyelenggaraan layanan manajemen Aparatur Sipil Negara di Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN telah memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional meliputi pelayanan kepangkatan, pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), status dan kedudukan kepegawaian), perencanaan kebutuhan serta layanan seleksi.
	Formula
	Jumlah layanan manajemen Aparatur Sipil Negara yang sudah sesuai standar/Jumlah seluruh layanan manajemen Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN *100% $N = \left(\frac{A}{B}\right) \times 100\%$ N=Persentase penyelesaian penyelenggaraan layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai standar di Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN. A=Jumlah layanan manajemen Aparatur Sipil Negara yang selesai diselenggarakan sesuai standar B=Jumlah seluruh layanan manajemen Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan

Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di pusat maupun seluruh kantor regional I-XIV.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☒ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, yaitu: 1. Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN; 2. Direktorat Status dan Pemberhentian ASN; dan 3. Direktorat Perencanaan Kebutuhan ASN.			
Sumber Data	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Layanan Manajemen ASN Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN.			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKP 3. Persentase Pemenuhan Pedoman Standar Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN

Sasaran Program	Terwujudnya Pelayanan dan Pembinaan Manajemen ASN yang Unggul
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa diharapkan BKN dapat memberikan penyelenggaraan manajemen ASN dan pembinaan manajemen ASN dengan pelayanan yang unggul, antara lain: - Penyelenggaraan Layanan seluruh aspek manajemen ASN meliputi penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan manajemen ASN; - Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN strategis meliputi penyusunan kebijakan teknis manajemen ASN dan bimbingan teknis.
Indikator Kinerja Program	Persentase Pemenuhan Pedoman Standar Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Persentase terselesaikannya penyusunan pedoman standar penyelenggaraan layanan manajemen ASN di lingkungan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN. Pedoman Standar meliputi aspek sebagai berikut: - Persyaratan; - Sistem, Mekanisme dan Prosedur; - Jangka Waktu Pelayanan; - Biaya/Tarif; - Produk Pelayanan; - Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan; - Dasar Hukum; - Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas; - Kompetensi Pelaksana; - Pengawasan Internal; - Jumlah Pelaksana (jumlah pegawai); - Jaminan Pelayanan; - Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan - Evaluasi Kinerja Pelaksana.
	Formula
	$N = \left(\frac{A}{B} \right) \times 100\%$ N=Persentase pemenuhan pedoman standar penyelenggaraan layanan manajemen ASN A= Jumlah pedoman standar pelayanan yang ditetapkan

	B= Jumlah pedoman standar pelayanan yang direncanakan			
Tujuan	Menciptakan birokrasi di Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, yaitu: 1. Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN; 2. Direktorat Status dan Pemberhentian ASN; dan 3. Direktorat Perencanaan Kebutuhan ASN.			
Sumber Data	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Layanan Manajemen ASN Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN.			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKP 4. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan Manajemen ASN

Sasaran Program	Terwujudnya Pelayanan dan Pembinaan Manajemen ASN yang Unggul
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa diharapkan BKN dapat memberikan penyelenggaraan manajemen ASN dan pembinaan manajemen ASN dengan pelayanan yang unggul, antara lain: - Penyelenggaraan Layanan seluruh aspek manajemen ASN meliputi penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan manajemen ASN; - Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN strategis meliputi penyusunan kebijakan teknis manajemen ASN dan bimbingan teknis.
Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Ukuran yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Badan kepegawaian Negara melalui beberapa unit kerja dibawahnya, diantaranya: - Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN; - Direktorat Status dan Pemberhentian ASN; dan - Direktorat Perencanaan Kebutuhan ASN.
	Formula
	Perhitungan rata-rata indeks kepuasan masyarakat seluruh layanan manajemen ASN, adalah sebagai berikut: $N = \frac{A+B+C}{3}$ N = rata-rata indeks kepuasan layanan manajemen ASN di Kedeputan Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN A = Nilai indeks kepuasan pelayanan Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN B = Nilai indeks kepuasan pelayanan Direktorat Status dan Pemberhentian ASN C = Nilai indeks kepuasan pelayanan Direktorat Perencanaan Kebutuhan ASN

	IKM = SKM x 25 Dimana: IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat SKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Dimana bobot = 1 / jumlah unsur = 1 / 9 = 0.11 Catatan: Pengukuran disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.			
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan atas layanan dan pembinaan kepegawaian yang diselenggarakan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan manajemen ASN			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Unit BHKP			
Sumber Data	Laporan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pembinaan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN, Direktorat Status dan Pemberhentian ASN, dan Direktorat Perencanaan Kebutuhan ASN.			

Jenis Perhitungan Data	(✓) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(✓) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(✓) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(✓) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKP 5. Persentase Capaian Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN

Sasaran Program	Terwujudnya Pelayanan dan Pembinaan Manajemen ASN yang Unggul
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa diharapkan BKN dapat memberikan penyelenggaraan manajemen ASN dan pembinaan manajemen ASN dengan pelayanan yang unggul, antara lain: - Penyelenggaraan Layanan seluruh aspek manajemen ASN meliputi penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan manajemen ASN; - Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN strategis meliputi penyusunan kebijakan teknis manajemen ASN dan bimbingan teknis.
Indikator Kinerja Program	Persentase Capaian Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Mengukur sejauh mana unit kerja mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen ASN. Inovasi yang dimaksud harus memenuhi unsur: kebaruan, relevansi terhadap kebutuhan layanan, dan memiliki dampak atau potensi peningkatan kualitas layanan.
	Formula
	$N = \left(\frac{A}{B}\right) \times 100\%$ N=Persentase capaian inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Deputy Bidang penyelenggaraan layanan manajemen ASN A= Jumlah capaian inovasi B= Jumlah inovasi yang direncanakan
Tujuan	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Inovasi dilakukan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, mendorong efisiensi birokrasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(✓) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(✓) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta		(✓) Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN.			
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Proyek Inovasi Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN			
Jenis Perhitungan Data	(✓) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(✓) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(✓) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(✓) Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKP 6. Persentase Pemenuhan Service Level Agreement (SLA) Persuratan di Lingkungan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN

Sasaran Program	Terwujudnya Pelayanan dan Pembinaan Manajemen ASN yang Unggul
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa diharapkan BKN dapat memberikan penyelenggaraan manajemen ASN dan pembinaan manajemen ASN dengan pelayanan yang unggul, antara lain: - Penyelenggaraan Layanan seluruh aspek manajemen ASN meliputi penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan manajemen ASN; - Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN strategis meliputi penyusunan kebijakan teknis manajemen ASN dan bimbingan teknis.
Indikator Kinerja Program	Persentase Pemenuhan Service Level Agreement (SLA) Persuratan di Lingkungan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	SLA merupakan komitmen atau standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam menindaklanjuti/merespon surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu ditindaklanjuti. SLA menetapkan bahwa jawaban surat masuk harus diberikan paling lambat 4 hari kerja sejak surat eksternal diterima oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN dan surat internal diterima oleh unit kerja terkait, diluar layanan yang sudah memiliki SLA tersendiri. Apabila terdapat surat yang memiliki kurun waktu atau masa tenggat waktu permintaan tindaklanjut/respon kurang dari atau lebih dari 4 hari kerja, maka selama dapat memenuhi dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut maka dihitung telah memenuhi SLA 4 hari kerja.
	Formula
	$N = \left(\frac{A}{B} \right) \times 100\%$ N= Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari kerja di lingkungan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN A =Jumlah surat masuk yang telah ditindaklanjuti/direspon paling lambat 4 hari kerja B =Jumlah surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal

Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di pusat maupun seluruh kantor regional I-XIV.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output	☐ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☐ Cascading Peta		☒ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN.			
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Persuratan Unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN.			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKP 7. Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja			
Deskripsi Sasaran Program	Sasaran strategis ini mengacu pada upaya untuk membangun dan mengelola organisasi serta sumber daya manusia (SDM) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menciptakan organisasi yang efektif, adaptif, dan profesional, didukung SDM yang kompeten, berintegritas, dan fokus pada capaian kinerja. Melalui penguatan tata kelola, pengembangan kompetensi, dan penerapan budaya kerja yang berorientasi hasil, BKN diharapkan mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan negara.			
Indikator Kinerja Program	Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi			
	Indikator ini mengukur pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN. Rencana aksi tersebut merupakan kegiatan Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN yang telah dikoordinasikan dan disetujui oleh Tim RB Badan kepegawaian Negara Pusat.			
	Formula			
	Membandingkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang sudah ditetapkan dengan yang sudah terlaksana $N = \left(\frac{A}{B}\right) \times 100\%$ N = Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN A = Jumlah Rencana Aksi RB yang telah dilaksanakan B = Jumlah Rencana Aksi RB yang direncanakan			
Tujuan	Sebagai alat monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Target	Aspek	(✓) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu () Biaya

Kualitas dan Tingkat Kendali	☐ Outcome		☒ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKP.8 Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Sasaran strategis ini mengacu pada upaya untuk membangun dan mengelola organisasi serta sumber daya manusia (SDM) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menciptakan organisasi yang efektif, adaptif, dan profesional, didukung SDM yang kompeten, berintegritas, dan fokus pada capaian kinerja. Melalui penguatan tata kelola, pengembangan kompetensi, dan penerapan budaya kerja yang berorientasi hasil, BKN diharapkan mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan negara.
Indikator Kinerja Program	Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di Badan kepegawaian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Penilaian oleh Inspektorat Badan kepegawaian Negara berdasarkan Kepka Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN.
	Formula

	Hasil penilaian oleh Inspektorat Badan kepegawaian Negara berdasarkan Kepka No. 321.1 tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN			
Tujuan	1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN; 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN; 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja di Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN; 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN; 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☐ Hasil perhitungan raw data		☒ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKP 9. Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Sasaran strategis ini mengacu pada upaya untuk membangun dan mengelola organisasi serta sumber daya manusia (SDM) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menciptakan organisasi yang efektif, adaptif, dan profesional, didukung SDM yang kompeten, berintegritas, dan fokus pada capaian kinerja. Melalui penguatan tata kelola, pengembangan kompetensi, dan penerapan budaya kerja yang berorientasi hasil, BKN diharapkan mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan negara.
Indikator Kinerja Program	Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Ukuran yang menggambarkan persentase jumlah pegawai yang mengisi kinerja harian dalam satu periode pada aplikasi E-Kinerja. Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja.
	Formula
	Membandingkan antara jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian dengan jumlah pegawai di unit kerja. $N = \left(\frac{A}{B}\right) \times 100\%$ N = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN A = Jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN B = Jumlah seluruh pegawai di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN
Tujuan	Untuk mengetahui kepatuhan dan produktivitas kinerja pegawai di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN

Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output	☐ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☐ Outcome		☒ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☐ Cascading Peta		☒ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN			
Sumber Data	Rekapitulasi Pengisian Kinerja Harian Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKP 10. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN

Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Sasaran strategis ini mengacu pada upaya untuk membangun dan menerapkan tata kelola di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berlandaskan prinsip modernisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui: 1. Digitalisasi Proses Governansi Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia serta pelayanan publik di bidang kepegawaian. Transformasi digital ini melibatkan pengembangan sistem digital yang terintegrasi, mudah diakses, dan dapat diandalkan. 2. Berbasis Bukti (<i>Evidence-Based</i>) Keputusan, kebijakan, dan praktik dalam tata kelola organisasi didasarkan pada data yang valid, akurat, dan terukur. Pengelolaan data yang baik digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang objektif dan strategis sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi. 3. Akuntabilitas Penerapan prinsip tanggung jawab yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya, pelaksanaan tugas, dan pencapaian target kinerja. Akuntabilitas ini dicapai melalui pelaporan yang transparan, mekanisme pengawasan yang efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku.
Indikator Kinerja Program	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN merupakan indikator kinerja yang memperlihatkan seberapa besar serapan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN yang mana semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi pengguna anggaran.

	Formula			
	$N = \left(\frac{A}{B}\right) \times 100\%$ N = Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN A = Jumlah serapan anggaran Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN B = Jumlah pagu anggaran Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN			
Tujuan	Untuk memperlihatkan efektivitas dalam melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan sebelumnya di Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN dalam memperbaiki tata kelola			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output	☐ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☐ Cascading Peta		☒ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan Penyerapan Anggaran yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☐ Hasil perhitungan raw data		☒ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko				

IKP 11. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN

Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Sasaran strategis ini mengacu pada upaya untuk membangun dan menerapkan tata kelola di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berlandaskan prinsip modernisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui: 1. Digitalisasi Proses Governansi Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia serta pelayanan publik di bidang kepegawaian. Transformasi digital ini melibatkan pengembangan sistem digital yang terintegrasi, mudah diakses, dan dapat diandalkan. 2. Berbasis Bukti (<i>Evidence-Based</i>) Keputusan, kebijakan, dan praktik dalam tata kelola organisasi didasarkan pada data yang valid, akurat, dan terukur. Pengelolaan data yang baik digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang objektif dan strategis sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi. 3. Akuntabilitas Penerapan prinsip tanggung jawab yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya, pelaksanaan tugas, dan pencapaian target kinerja. Akuntabilitas ini dicapai melalui pelaporan yang transparan, mekanisme pengawasan yang efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku.
Indikator Kinerja Program	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi Suatu instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN pada tahun berjalan. Indikator ini menggambarkan jumlah temuan yang diidentifikasi oleh BPK maupun Inspektorat melalui audit keuangan, audit operasional, maupun audit kinerja terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Audit keuangan yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa

	Keuangan. Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh APIP. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Sementara, audit operasional yang sering dikenal juga sebagai audit ketaatan hanya menilai kepatuhan suatu program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern. Semakin kecil rasio temuan yang terjadi, semakin baik kinerja pengelolaan keuangan, operasional, dan pelaksanaan tugas fungsi unit kerja, karena menunjukkan kepatuhan pada regulasi, efektivitas penggunaan sumber daya, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.			
	Formula			
	Membandingkan jumlah temuan dengan jumlah kegiatan yang diaudit oleh BPK dan Inspektorat $N = \left(\frac{A}{B}\right) \times 100\%$ N = Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan tahun 2025 di lingkungan Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN A = Jumlah Temuan Audit/ Pemeriksaan atas kegiatan tahun 2025 B = Jumlah Kegiatan yang diaudit oleh BPK dan Inspektorat atas Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN			
Tujuan	Untuk meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN dalam memperbaiki tata kelola			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(✓) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(✓) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah

Jenis Cascading IKK	☐ Cascading Peta		☒ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputy Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN			
Sumber Data	Rekapitulasi Temuan BPK/Inspektorat berdasarkan SPM			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☐ Maksimize		☒ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Mitigasi Risiko				